

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023**

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Uraian	
				Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transf ormasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-		Bagian OrgnassasiSetda	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	50	Menyusun Draf Perbup Sistem Kerja Baru	Dokumen	Jumlah Dokumen Ranperbup	-	-	-	1	1	Rp.	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.50	Revisi dokumen tata kelola SPBE (Peraturan Bupati, Keputusan Bupati)	Dokumen	Jumlah dokumen tata kelola SPBE	-	0	0	1	1	175.000.000	DISKOMINFO-SP (APTIKA)	Seluruh Unit Kerja
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi

Indeks Perencanaan Pembangunan

93,85	Penyusunan dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	-	-	1	1	81.950.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Pelaksanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	-	-	1	1	101.170.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	-	-	-	1	59.360.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	1	-	-	1	56.575.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	1	-	-	1	104.780.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	385	-	-	-	385	71.345.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan RPJPD/RPJMD/RKPD	-	1	1	-	2	738.729.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
	Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	-	1	-	1	56.754.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait

			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	41	-	-	1	52.796.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	-	-	1	1	26.193.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	-	2	-	-	2	110.512.500	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	-	-	1	-	1	12.188.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	2	2	1	1	6	380.871.500	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordini Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	70.800.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	4	74.900.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	1	1	1	1	4	186.350.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
					Pembangunan								

					Manusiayang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)										
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan DokumenPerenc anaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	1	1	4	89.200.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada BidangPembang unan Manusia	1	1	1	1	4	148.580.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait		
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordini Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	68.650.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan DokumenPerenc anaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	1	1	1	4	24.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	1	1	4	96.100.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait		

			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	182.330.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	1	1	1	4	76.070.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	76.770.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	4	60.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	101.680.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	-	1	1	270.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	-	1	1	143.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	1	1	105.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1	1	105.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1	129.400.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	-	-	1	1	300.780.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	-	1	1	50.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan	a. Dokumen	a. Jumlah dokumen perencanaan	2	-	-	-	2	Rp. 30.114.000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	b. Dokumen	b. Jumlah dokumen perangkat daerah yang direviu	1	-	-	-	1	Rp. 11.050.000		
			c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	c. OPD	b. Jumlah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41	41	41	41	41	Rp. 150.330.630		

					c. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kinerjanya									
			Penguatan keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0	1	1	0	2	Rp. 42.096.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR	
			Penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah	Jumlah hasil evaluasi perencanaan yang dilaporkan	4	4	4	4	16	Rp. 44.000.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR	
			Penguatan pendampingan/desk penyusunan dokumen	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	0	1	1	0	2	Rp. 42.096.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR	
			Penguatan keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0	1	1	0	2	Rp. 30.000.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan	
			Penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah	Jumlah hasil evaluasi perencanaan yang dilaporkan	2	2	2	4	10	Rp.54.735.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan	
			Penguatan pendampingan/desk penyusunan dokumen	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	0	1	1	0	2	Rp. 30.000.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan	
	Nilai SAKIP	71(BB)	a. Evaluasi LAKIP OPD	a. OPD	a. Jumlah OPD yang dievaluasi	41	41	41	41	41	Rp. 17.000.000	Inspektorat	Seluruh OPD	
			b. Reviu LAKIP Pemerintah Daerah	b. Dokumen	b. Jumlah Dokumen LAKIP Pemerintah Daerah yang direviu	1	-	-	-	1	Rp. 10.000.000			
			Desk Evaluasi Dokumen Perencanaan Kinerja	OPD	Jumlah OPD yang di desk evaluasi	41	41	41	41	41		Bapelitbangda	Seluruh OPD	

			Penyusunan LAKIP Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen LAKIP	-	1	-	-	1	Rp.6.000.000	Bagian Organsiasi Setda	Seluruh OPD
			Coaching/Pembimbingan implementasi SAKIP	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	-	1	-	-	1	Rp. 116.112.250,	Bagian Organsiasi Setda	Seluruh OPD
Pelaksanaan pelayanan publik Digital	Tingkat Implementasi kebijakan Transformasi Digital MPP	5	Mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD yang merupakan program Nasional	Objek Pajak dan Retribusi	Transaksi Digital	1	1	2	1	5		Bapenda dan OPD Pengelola Retribusi	Bapenda dan OPD Pengelola Retribusi
		90,61%	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah laporan Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	0	0	0	1	65.545.000,-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
			Pemuktahiran data kependudukan per semester	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	3	392.636.900,-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
		100 %	Mengeluarkan rekomendasi Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi OSS	Dokumen	Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan	19,23 %	22,44 %	25,64 %	32,69 %	100 %	35.000.000	DINKES	Bidang SDK
		4 Pelayanan Public	Melaksanakan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Info Loker	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	25	25	25	25	100	47.977.100	Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
			Melakukan Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1) secara daring/ online	%	Persentase pelayanan kartu pencari kerja	100	100	100	100	100		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
			Melakukan Pelayanan Pencatatan PKWT/PKWTT secara daring/ online	%	Persentase Pelayanan Pencatatan PKWT/ PKWTT	100	100	100	100	100		Dinas Transnaker	Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

[illegible]

			Penurunan jumlah temuan pada OPD dan Desa		Presentase jumlah penurunan temuan pada OPD dan Desa	25	30	35	40	40	Rp. 1.150.274.036	Inspektorat	Inspektorat
			Penurunan jumlah proyek fisik bermasalah		Jumlah Proyek fisik yang bermasalah	-	-	-	-	5	Rp.351.00.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100	Pembuatan Kanal Pengaduan Masyarakat melalui berbagai media sosial dan website		Persentase Pengaduan Masyarakat yang masuk dan diberikan rekomendasi	100	100	100	100	100	Rp.619.690.900	Inspektorat	Inspektorat
		100%	Optimalisasi Penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR!	Dokumen	Jumlah Dokumen SP4N-LAPOR!	0	0	0	1	1	56.999.925	DISKOMINFO-SP (IKP)	DISKOMINFO-SP (IKP)
			Monitoring dan Evaluasi admin penghubung SP4N-LAPOR!	Kali	Jumlah OPD	0	20	21	0	41		DISKOMINFO-SP (IKP)	SELURUH OPD
			Penyebarluasan aplikasi SP4N-LAPOR! Melalui media partner pemerintah Kab. Lutim	saluran	Jumlah saluran	1	1	1	2	5		DISKOMINFO-SP (IKP)	SELURUH OPD
		100 %	Mengaktifkan aplikasi layanan pengaduan melalui SPAN-LAPOR dan kotak saran	laporan	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	DINKES	Sekretariat
		205	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	1	-	-	1	Rp. 31.302.610	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	44 Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan pemadam kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-	-	1	-	1	Rp. 25.033.180	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persen	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang di Fasilitasi	25	25	25	25	100	Rp. 2.999.793	Kecamatan Tomoni	Kasi Trantib
		8	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	2	2	2	2	8	Rp. 7.365.000	Kecamatan Tomoni Timur	Unsur Staf Kecamatan Tomoni Timur
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75	a. Penguatan Impementasi Pemetaan resiko korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi yang dipetakan	a. Persen	a. Persentas e OPD Binaan yang tersangkut kasus korupsi	1	1	1	1	4	Rp. 737.290.000	Inspektorat	Seluruh unit kerja
					b. Presentas e Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK, Inspektora t Provinsi dan Inspektora t Kabupate n	89	90	90	91	91	Rp. 413.478.000		

Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum	B (70)	Melakukan Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan untuk harmonisasi di kementerian Hukum dan HAM	12	13	15	15	53	Rp 208.804.000	Bagian Hukum	Perangkat Daerah Terkait dengan Produk Hukum Daerah
			Mengikutsertakan ASN Perancang Perundang-Undangan dalam Pelatihan pengembangan Kompetensi	Persentase	Kompetensi ASN perancang Perundang-Undangan	0	0	1	0	1	Rp 10.000.000	Bagian Hukum	BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
			Melakukan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah	Jumlah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang dievaluasi	0	0	1	1	2	Rp 50.000.000	Bagian Hukum	Perangkat Daerah Terkait dengan Produk Hukum Daerah
			Melakukan integrasi JDIH Kabupaten Luwu Timur dengan JDIHN	Jumlah	Jumlah Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi ke JDIHN	12	13	15	15	53	Rp 20.000.000	Bagian Hukum	Tim JDIH Kabupaten Luwu Timur
			Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ranperda	Jumlah Ranperda yang difasilitasi	6	3	3	3	15	1.984.253.511	Sekretariat DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	+18 UPT + 11 BPP	Pendataan Tanda tangan Elektronik Kepala UPT (Puskesmas dan Koordinator BPP	UPT + BPP	Jumlah UPT + BPP	0	0	29	0	29	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Srikandi	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	0	0	116	0	116	100.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Implementasi Penggunaan Aplikasi Srikandi	UPT + BPP	Jumlah UPT + BPP	0	0	18	11	29.	10.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Monitoring dan evaluasi penggunaan Aplikasi Srikandi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	1	1	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)

Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	1. Pembuatan aplikasi Satu Data	Aplikasi	Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi satu data	0	15	0	0	15	200.000.000	DISKOMINFO-SP (STATISTIK)	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			2. Penetapan peraturan bupati mengenai pemanfaatan satu data statistic sektoral	Dokumen	Jumlah dokumen peraturan bupati yang diterbitkan	0	0	1	0	1	15.000.000	DISKOMINFO-SP (STATISTIK)	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
		325.926	Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap	Dokumen	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan	1	1	1	1	4	Rp63.104.630	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
			Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya	Dokumen	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan	1	1	1	1	4	Rp63.373.215	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	65,01	Penginputan RUP OPD Pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ;	100	-	-	-	100	-	Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			Penyelesaian Paket Epurchasing pada Aplikasi e-Katalog LKPP	Persentase	Paket diselesaikan pada aplikasi e-Katalog LKPP	5	5	5	85	100	-	Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	Jumlah paket non etendering dan non epurchasing yang diinputkan pada spse dibandingkan dengan jumlah paket RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	5	5	5	85	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	jumlah paket tender yang selesai proses pada spse dibandingkan dengan jumlah paket RUP untuk	-	40	60	-	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket Tender

					Paket tender								
			Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	melakukan ePurchasing melalui Toko Daring	100	-	-	-	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket epurchasing dengan Platform Toko Daring
			Pencatatan e-Kontrak untuk paket non tender/tender pada aplikasi SPSE	Persentase	Jumlah paket Non Tender dan tender yang diinputkan dalam e-Kontrak dan melalui proses PBJ melalui SPSE	5	10	20	65	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket non tender dan tender
			Penambahan Jumlah pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah	Jumlah pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa yang permanen pada Bagian PBJ	-	-	-	-	-		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Bagian Organisasi dan BKPSDM
			Pemenuhan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Persentase	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-	-	31,11	31,11		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Bagian Organisasi, BKPSDM
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Peningkatan Kapasitas (bimtek/Coaching) bagi Pengelola Keuangan termasuk Pengurus Aset SKPD	Jumlah	Jumlah Pengelola Keuangan/Aset SKPD	177		177		354	96.400.000,-	BKAD	Seluruh SKD
			Peningkatan Pengendalian Internal Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekonsiliasi Laporan	Persen (%)	Persentase Laporan SKPD/Unit Kerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	27.500.000,-	BKAD	Seluruh SKPD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90%	Penyelesaian Catatan BPK-RI terkait LKPD Luwu Timur	Persen (%)	Persentase Tindakan lanjut atas Catatan/Rekomendasi atas LKPD Luwu Timur	90%	90%	90%	90%	90%	-	BKAD	BKAD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	84,26 %	1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional; 2. Pelaksanaan penyusunan Dupak 3. Fasilitasi Pengembangan	%	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	65%	70%	75%	84,26 %	84,26%	Rp. 82.218.000	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir)

			Karir dalam Jabatan Fungsional										
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	25%	1. Penetapan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta 2. Pelaksanaan assesment center bagi pejabat struktural 3. Pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat JPT Pratama	%	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti assesment	25%	0%	0%	0%	25%	Rp. 630.378.100	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir)
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kinerja	4.453 Orang	1. Penyusunan Kebijakan daerah tentang peraturan pemberian Reward bagi ASN yang berkinerja baik dan Punishment bagi ASN yang berkinerja buruk 2. Pemberian Reward bagi ASN yang berkinerja baik dan Punishment bagi ASN yang berkinerja buruk	Jumlah	Jumlah ASN yang berkinerja baik (sesuai ekspektasi)	4.453 Orang	-	-	-	4.453 Orang	Rp. 105.735.000	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian)
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	65%	1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. 2. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip <i>The Right Man on The Right Job</i> melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assesment center. Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit	%	Persentase penerapan indeks sistem merit	15%	30%	45%	65%	65%	Rp. 300.000.000	BKPSDM	Pemkab. Luwu Timur

Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	90	Melakukan Survey Indeks BerAKHLAK terhadap seluruh ASN	%	Persentase ASN yang memahami Budaya Kerja BerAKHLAK							Bagian Organisasi Setda	Seluruh ASN
	Employeeer Branding	90											
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Dokumen Survey	-	-	1	-	1		Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik
			Monev Hasil Survey	Jumlah	Jumlah Laporan hasil Monev	-	-	-	1	1		Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik
	Indeks Indeks Pelayanan Publik	3,50	Melakukan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Publik	-	-	1	-	1	Rp.....	Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik
		72,80	Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pelayanan Publik	-	-	1	-	1	-	Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024**

[illegible]

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	94,17	Penyusunan dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	-	-	1	1	81.950.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	-	-	1	1	101.170.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	-	-	-	1	59.360.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	1	-	-	1	56.575.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	1	-	-	1	104.780.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	385	-	-	-	385	71.345.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	1	1	-	2	738.729.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk	-	-	1	-	1	56.754.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan									
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	-	1	1	143.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	1	1	105.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1	1	105.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1	129.400.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	-	-	1	1	300.780.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
			Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	-	1	1	50.000.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait	
	Penyusunan dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	-	-	1	1	81.950.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait			

			Pelaksanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	-	-	1	1	101.170.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	-	-	-	1	59.360.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	1	-	-	1	56.575.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	1	-	-	1	104.780.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi kas oleh Kecamatan	385	-	-	-	385	71.345.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (R/JPD/RPJMD/RKPD)	-	1	1	-	2	738.729.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	-	1	-	1	56.754.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	41	-	-	1	52.796.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	-	-	1	1	26.193.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait

			Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	-	2	-	-	2	110.512.500	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepa waktu	-	-	1	-	1	12.188.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	2	2	1	1	6	380.871.500	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	70.800.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	4	74.900.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	186.350.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan DokumenPerencan aan Pembangunan	1	1	1	1	4	89.200.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait

[illegible]

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	4	76.770.000	Bapelitbangda	BAppelitbangda dan OPD terkait
			d. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan	d. Dokumen	d. Jumlah dokumen perencanaan n perangkat daerah yang direviu	2	-	-	-	2	Rp. 30.114.000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	e. Dokumen	e. Jumlah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-	-	-	1	Rp. 11.050.000		
			f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	f. OPD	f. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kinerjanya	41	41	41	41	41	Rp. 150.330.630		
			g. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan	g. Dokumen	g. Jumlah dokumen perencanaan n perangkat daerah yang direviu	2	-	-	-	2	Rp. 30.114.000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			h. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	h. Dokumen	h. Jumlah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-	-	-	1	Rp. 11.050.000		
			i. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	i. OPD	i. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kinerjanya	41	41	41	41	41	Rp. 150.330.630		
			Penguatan keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0	1	1	0	2	Rp. 42.096.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR
			Penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah	Jumlah hasil evaluasi perencanaan yang dilaporkan	4	4	4	4	16	Rp. 44.000.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR

			Penguatan pendampingan/desk penyusunan dokumen	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	0	1	1	0	2	Rp. 42.096.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR
			Penguatan keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0	1	1	0	2	Rp. 30.000.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan
			Penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah	Jumlah hasil evaluasi perencanaan yang dilaporkan	2	2	2	4	10	Rp.54.735.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan
		78 (BB)	Penguatan pendampingan/desk penyusunan dokumen	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	0	1	1	0	2	Rp. 30.000.000	Dinas Perkimtan	Seluruh Bidang dan Sekretariat Disperkimtan
			Penguatan keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	0	1	1	0	2	Rp. 42.096.500	Dinas PUPR	Seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas PUPR
			a. Evaluasi LAKIP OPD b. Reviu LAKIP Pemerintah Daerah	a. OPD b. Dokumen	a. Jumlah OPD yang dievaluasi LAKIP nya b. Jumlah Dokumen LAKIP Pemerintah Daerah yang direviu	41 1	41 -	41 -	41 -	41 1	Rp. 17.000.000 Rp. 10.000.000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
	Nilai SAKIP		Desk Evaluasi Dokumen Perencanaan Kinerja	Jumlah	Jumlah OPD yang didesk	41	41	414	41	41	-	Bapelitbangda	Seluruh OPD
			Penyusunan LAKIP Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	-	1	-	-	1	Rp.6.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh OPD
			Coaching Clinic/Pembimbingan Implementasi SAKIP	Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	1	-	-	1	Rp.116.112.250	Bagian Organisasi Setda	Seluruh OPD

Pelaksanaan pelayanan publik Digital	Tingkat Implementasi kebijakan Transformasi Digital MPP	2	Mewujudkan Elekonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD yang merupakan program Nasional	Objek Pajak dan Retribusi	Transaksi Digital	1	1	-	-	2		Bapenda dan OPD Pengelola Retribusi	Bapenda dan OPD pengelola Retribusi
		91,08%	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah laporan Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	0	0	0	1	65.545.000,-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
			Pemuktahiran data kependudukan per semester	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	3	392.636.900,-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
		100 %	Mengeluarkan rekomendasi Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi OSS	Dokumen	Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan	19,23 %	22,44 %	25,64 %	32,69 %	100 %	35.000.000	DINKES	Bidang SDK
		4 Pelayanan publik	Melaksanakan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Info Loker	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	25	25	25	25	100	47.977.100	Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
			Melakukan Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1) secara daring/ online	%	Persentase pelayanan kartu pencari kerja	100	100	100	100	100		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
			Melakukan Pelayanan Pencatatan PKWT/PKWTT secara daring/ online	%	Persentase Pelayanan Pencatatan PKWT/ PKWTT	100	100	100	100	100		Dinas Transnaker	Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek
			Melakukan Pencatatan Penyedia Jasa dan Pencatatan Harian Lepas secara daring/ online	%	Persentase Pelayanan Pencatatan Penyedia Jasa dan Harian Lepas	100	100	100	100	100		Dinas Transnaker	Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

Pembangunan Zona Integritas di Unit	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	75	a. Penguatan Implementasi Pembangunan Zona Integritas b. Penguatan Pengendalian dan Evaluasi atas Implementasi Pembangunan ZI	a. Jumlah b. Jumlah	a. Jumlah OPD Pembangunan Zona Integritas b. Jumlah OPD yang di evaluasi atas implementasi Pembangunan ZI	3 3	- -	- -	- -	3 3	- -	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,3380	a. Penguatan implementasi manajemen risiko unit kerja	a. Jumlah b. Persen	a. Jumlah Hasil Pemetaan risiko dan permasalahan pengawasan kerja; b. Persentase unit kerja dengan tingkat manajemen risiko minimal baik	4 -	14 50%	25 -	- 90%	25 90%	- -	Inspektorat	Inspektorat
			B. Percepatan implementasi manajemen risiko unit kerja	b. Jumlah	b. Jumlah inovasi mitigasi risiko KKN yang efektif	-	1	-	2	3	-	-	-
			C. Peningkatan kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawasan Internal (APIP) dengan APH		c. Jumlah MoU kerjasama pengawasan	-	1	3	-	4	-	Inspektorat	Inspektorat
			D. Penurunan jumlah temuan pada OPD dan Desa		d. Presentase jumlah penurunan temuan pada OPD dan Desa	35	40	40	45	45	Rp. 1.150.274.036	Inspektorat	Inspektorat
			E. Penurunan jumlah proyek fisik bermasalah		e. Jumlah Proyek fisik yang bermasalah	-	-	-	-	3	Rp.351.00.000	Inspektorat	Inspektorat

Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	Optimalisasi Penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR!	Dokumen	Jumlah Dokumen SP4N-LAPOR!	0	0	0	1	1	56.999.925	DISKOMINFO-SP (IKP)	DISKOMINFO-SP (IKP)	
			Monitoring dan Evaluasi admin penghubung SP4N-LAPOR!	kali	Jumlah OPD	0	20	21	0	41		DISKOMINFO-SP (IKP)	SELURUH OPD	
			Penyebarluasan aplikasi SP4N-LAPOR! Melalui media partner pemerintah Kab. Lutim	saluran	Jumlah saluran	1	1	1	2	5		DISKOMINFO-SP (IKP)	SELURUH OPD	
		100 %	Mengaktifkan aplikasi layanan pengaduan melalui SPAN-LAPOR dan kotak saran	laporan	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	DINKES	Sekretariat	
		2	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau Penyelidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan	2 masalah	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2	0	0	0	2	20,000,000.00	DLH	Bidang Penataan dan penataan Lingkungan	
		100	a. Pembuatan Kanal Pengaduan Masyarakat melalui berbagai media sosial dan website	persentase	a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang masuk dan diberikan rekomendasi	100	100	100	100	100	Rp.619.690.900	Inspektorat	Inspektorat	
		174	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	1	-	-	1	Rp. 31.302.610	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	44 Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan pemadam kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-	-	1	-	1	Rp. 25.033.180	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persen	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang di Fasilitas	25	25	25	25	100	Rp. 2.999.793	Kecamatan Tomoni	Kasi Trantib
		4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	1	1	1	1	4	Rp. 9.820.000	Kecamatan Tomoni Timur	Unsur Staf Kecamatan Tomoni Timur
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75	A. Penguatan Impementasi Pemetaan resiko korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi yang dipetakan	b.Persen	B. Persentas e OPD Binaan yang tersangkut kasus korupsi	1	1	1	1	4	Rp. 737.290.000	Inspektorat	Seluruh unit kerja
					c. Presentas e Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa an BPK, Inspektora t Provinsi dan Inspektora t	90	92	92	92	92	Rp. 413.478.000		

					Kabupate n									
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Indeks Reformasi Hukum	BB (80)	Melakukan Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasika n untuk harmonisasi di kementerian Hukum dan HAM	12	13	15	15	53	Rp 208.804.000	Bagian Hukum	Perangkat Terkait Produk Daerah	Daerah dengan Hukum
			Mengikutsertakan ASN Perancang Perundang-Undangan dalam Bimbingan teknis, Workshop baik Klasikal maupun Non Klasikal	Jumlah	Kompetensi ASN perancang Perundang-Undangan	0	0	1	0	1	Rp.10.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum	
			Melakukan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dievaluasi	0	0	1	1	2	Rp 50.000.000	Bagian Hukum	Perangkat Terkait Produk Daerah	Daerah dengan Hukum
			Melakukan pengembangan Jaringan, Infoemasi dan Dokumentasi Hukum Kabupaten Luwu Timur	Aplikasi	Peningkatan layanan Aplikasi JDIH	0	0	1	0	1	Rp 20.000.000	Bagian Hukum	Tim Kabupaten Timur	JDIH Luwu
	18 Ranperda	Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ranperda	Jumlah Ranperda yang difasilitasi	6	5	4	3	15	1.984.253.511	Sekretariat DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan		

Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	128 Desa/Kelurahan	Pendataan Tanda tangan Elektronik Kepala Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0	128	0	128	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Srikandi	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	0	0	128	0	128	150.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Implementasi Penggunaan Aplikasi Srikandi	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0	128	0	128	10.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			Monitoring dan evaluasi penggunaan Aplikasi Srikandi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	1	1	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
		1000 berkas	Melakukan Penelusuran Arsip Statis	OPD	Jumlah Informasi Arsip Statis	5	24	11	-	40	Rp. 24,640,000	DPK	Bidang Kearsipan
			Memverifikasi Arsip Statis	Berkas	Jumlah Berkas Arsip Statis	-	500	500	-	1000			
			Mengidentifikasi Arsip Statis	Berkas	Jumlah Berkas Arsip Statis	-	500	500	-	1000			
			Melakukan Pengelolaan dan Pemberkasan Arsip Statis secara elektronik	Berkas	Jumlah arsip statis yang dikelola secara elektronik	-	500	500	-	1000			
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	25	1. Pembuatan aplikasi Satu Data	Aplikasi	Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi satu data	0	25	0	0	25	200.000.000	DISKOMINFO-SP (STATISTIK)	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
			2. Penetapan peraturan bupati mengenai pemanfaatan satu data statistik sektoral	Dokumen	Jumlah dokumen peraturan bupati yang diterbitkan	0	0	1	0	1	15.000.000	DISKOMINFO-SP (STATISTIK)	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
		326.122	Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap	Dokumen	Jumlah dokumen data dan informasi sumber	1	1	1	1	4	Rp22.877.160	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap

					daya perikanan								
			Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya	Dokumen	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	1	1	1	1	4	Rp200.000.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,01	a. Penginputan RUP OPD Pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ;	100	-	-	-	100	-	Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			b. Penyelesaian Paket Epurchasing pada Aplikasi e-Katalog LKPP	Persentase	Paket diselesaikan pada aplikasi e-Katalog LKPP	5	5	5	85	100	-	Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			c. Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	jumlah paket non etendering dan non epurchasing yang diinputkan pada spse dibandingkan dengan jumlah paket RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	5	5	5	85	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Seluruh unit kerja
			d. Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	jumlah paket tender yang selesai proses pada spse dibandingka	-	40	60	-	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket Tender

					n dengan jumlah paket RUP untuk Paket tender								
			e. Pencatatan non eTendering/non ePurchasing pada Aplikasi SPSE	Persentase	melakukan ePurchasing melalui Toko Daring	100	-	-	-	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket epurchasing dengan Platform Toko Daring
			f. Pencatatan e-Kontrak untuk paket non tender/tender pada aplikasi SPSE	Persentase	Jumlah paket Non Tender dan tender yang diinputkan dalam e-Kontrak dan melalui proses PBJ melalui SPSE	5	10	20	65	100		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Unit kerja yang memiliki paket non tender dan tender
			g. Penambahan Jumlah pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah	Jumlah pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa yang permanen pada Bagian PBJ	-	-	2	-	2		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Bagian Organisasi dan BKPSDM
			h. Pemenuhan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Persentase	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-	-	35,56	35,56		Bagian PBJ Setdakab. Luwu Timur	Bagian Organisasi, BKPSDM
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Peningkatan Kapasitas (bimtek/Coaching) bagi Pengelola Keuangan termasuk Pengurus Aset SKPD	Jumlah	Jumlah Pengelola Keuangan/Aset SKPD	177		177		354	95.000.000,-	BKAD	Seluruh SKD
			Peningkatan Pengendalian Internal Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekonsiliasi Laporan	Persen (%)	Persentase Laporan SKPD/Unit Kerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	30.000.000,-	BKAD	Seluruh SKPD

	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90%	Penyelesaian Catatan BPK-RI terkait LKPD Luwu Timur	Persen (%)	Persentase Tindaklanjutan atas Catatan/Rekomendasi atas LKPD Luwu Timur	90%	90%	90%	90%	90%	25.000.000	BKAD	BKAD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	87,53 %	1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional	%	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	65%	70%	75%	87,53%	87,53%	Rp. 100.000.000	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir)
			2. Pelaksanaan penyusunan Dupak										
			3. Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional										
			4. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional										
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	30%	1. Penetapan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta	%	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti assesment	30%	0%	0%	0%	30%	Rp. 450.000.000	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir)
			2. Pelaksanaan assesment center bagi pejabat structural										
			3. Pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat JPT Pratama										

Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kinerja	6.186 Orang	1. Penyusunan Kebijakan daerah tentang peraturan pemberian Reward bagi ASN yang berkinerja baik dan Punishment bagi ASN yang berkinerja buruk	Jumlah	Jumlah ASN yang berkinerja baik (sesuai ekspektasi)	6.186 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	6.186 Orang	Rp. 116.308.500	BKPSDM	BKPSDM (Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian)
			2. Penyusunan Kebijakan daerah tentang peraturan pemberian Reward bagi ASN yang berkinerja baik dan Punishment bagi ASN yang berkinerja buruk										
		2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	1	0	2	Rp. 17.000.000	Camat	Unsur staf kec. Mangkutana
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	-	-	4	Rp. 32.160.000	Kecamatan Tomoni	SKPD Penyelenggara Bimtek
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	4	Rp. 27.780.000	Kecamatan Tomoni Timur	Unsur Staf Kecamatan Tomoni Timur
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	70%	1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. 2. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip <i>The Right Man on The Right</i>	%	Persentase penerapan indeks sistem merit	20%	30%	50%	70%	70%	Rp. 300.000.000	BKPSDM	Pemkab. Luwu Timur

			Job melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center.											
			3. Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit											
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	100												
	Employeeer Branding	100												
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Dokumen Survey	-	-	1	-	1		Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik	
			Monev Hasil Survey	Jumlah	Jumlah laporan Hasil Monev	-	-	-	1	1		Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik	
	Indeks Pelayanan Publik	4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Monev Pelayanan Publik	-	1	-	-	1	Rp.....	Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik	
		81	Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pelayanan Publik	-	-	1	-	1	-	Bagian Organisasi Setda	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik	

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

TEMA : PENGENTASAN KEMISKINAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Banyaknya orang miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas	Meningkatnya Pemberdayaan sosial kepada masyarakat melalui bantuan usaha KUBE	sentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	43,93 %	Pemberian bantuan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui KUBE (kelompok		55			55	Terkait	Rp 1.375.000.000	Dinsos P3A	Bidang Rehabilitasi dan Pemverdayaan Sosibl
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Kepada PMKS	nsentase Jumlah warga negara Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Tersedia data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar dan Gepeng yang Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	orang	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM				26123	26123	Terkait	Rp 157.538.100	Dinsos P3A	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya PMKS yang ditangani	sentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)	100 %	Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga,Masyarakat,Dinas Sosail,Rumah Singgah/Shelter dan/atau	10	65	10	15	100	Terkait	Rp 163.165.000	Dinsos P3A	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

						Pusat Kesejahteraan Sosia										
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya penanganan bencana alam dan bencana social	sentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Terlaksananya bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Orang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	50	75	75	50	250	Terkait	Rp. 205.528.900	Dinsos P3A	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak	Menurunnya Rasio Korban tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	upan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	81,82	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Kasus	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2	3	3	3	11	Terkait	Rp. 633.434.051	Dinsos P3A	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Aanak/ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
Pertumbuhan penduduk yang belum Optimal	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,53	Meningkatkan Cakupan Penguna Alat Kontrasepsi	%	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	Terkait	5.369.466.441,00	DPPKB	Bidang dalduk dan KB	
		Menyediakan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan		Faskes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon	21	21	21	21	21	Terkait	1.837.634.576,00	DPPKB	Bidang KB		
		Meningkatkan Advokasi, KIE kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Orang	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	40				40	Terkait	95.000.000,00	DPPKB	Bidang KB		
		Melakukan Penyuluhan KB pada PUS		Orang	Jumlah PUS Ikut penyuluhan KB	762	762	762	762	3048	Terkait	296.000.000,00	DPPKB	Bidang KB		

				Melakukan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan kepada Tenaga Lapangan (PKB, PLKB PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang	Jumlah PKB, PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	681	681	681	681	681	Terkait	1.493.689.000,00	DPPKB	Bidang Daldujk	
1. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Luwu Timur masih berada pada kelas risiko tinggi	Meningkatnya Ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	Pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	Nilia IKD	-	-	-	0,45	0,45	Terkait dengan lansung dengan stakeholder	Rp. 64.997.400	BPBD	BPBD	
2. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 625.000.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait
3. Bencana dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan					Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase jumlah korban laki -laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 40.000.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 40.000.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait
					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penvakit	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 20.000.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait

				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 30.000.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait
Terjadi Penurunan Angka Partisipasi Sekolah	Meningkatnya Angka Rata-Rata lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60%	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Usia 5-6 Tahun				60	60	Terkait	10.849.619.130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar	100%	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar Usia 7-12 Tahun				100	100	Terkait	64.456.560.449	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Usia 13-15 Tahun				100	100	Terkait	34.679.576.080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Menuntaskan Kejar Paket A, B, dan C	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun				100	100	Terkait	3.289.660.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rendahnya kemampuan UMKM dalam mengelola usaha	Meningkatnya kemampuan UMKM dalam mengelola usaha	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	60	Melaksanakan pelatihan UMKM	UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih	-	60	-	-	60	Terkait	380.503.540	Disdagkoprin um	Bid. UMKM
Masih banyaknya orang miskin di wilayah pesisir	Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat pesisir (Kelompok)	54 Kelompok	Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan	Kelompok	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan	-	3	13	9	25		Rp3.871.800.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap

						ikan yang disediakan										
				Pemberian benih unggul serta sarana dan penunjangnya	Kelompok	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	-	13	14	-	27		Rp1.607.600.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya	
				Pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan	Kelompok	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	-	2	-	-	2		Rp524.240.000	Dinas Perikanan	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan	
Terjadi penurunan produksi tanaman pertanian	Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian	Jumlah produktivitas Padi	7.13 Ton/Ha	Penggunaan benih varietas unggul	Kg	Jumlah benih padi yang diadakan		73,500			73,500.00	Terkait	955,305,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	
		Jumlah produktivitas Jagung	6.51 Ton/Ha	pengendalian serangan hama & penyakit tanaman	%	Persentasi OPT tanaman pangan yang dikendalikan		95.00			95.00	Terkait	394,910,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	
		Jumlah produktivitas Kakao	0.82 Ton/Ha		%	presentase pengendalian tingkat serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan		95.00			95.00	Terkait	18,750,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	
		Jumlah produktivitas Kelapa Sawit	11.95 Ton/Ha	AUTP	Ha	Jumlah luas lahan yang diasuransikan			2,500.00		2,500.00	Terkait	90,000,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	
		Jumlah produktivitas Lada	0.97 Ton/Ha	Instensifikasi tanaman perkebunan	Ha	Jumlah lahan perkebunan yang diintensifikasi				75.70	75.70	Terkait	302,800,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	

				Pembangunan kolam perendaman lada	Unit	Jumlah Kolam Perendaman Merica yang dibangun				1.00	1.00	Terkait	196,200,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja
Data Penerima Bantuan Iuran PBI APBD dan PBI Integrasi yang telah meninggal dunia dan tidak dilakukan pelaporan kepada dinas kesehatan	Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran yang Update	Tersedianya data penerima bantuan Iuran PBI APBD dan PBI Integrasi yang Valid	Dokumen MoU dan Data Penerima Bantuan Iuran yang terupdate	Melaksanakan Penandatanganan MoU dengan pihak BPJS Kesehatan dan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	Berkas	Tersedianya MoU dengan pihak BPJS dan Disdukcapil	2	-	-	-	2	Terkait	-	Dinss Kesehatan	Bidang Yankes, BPJS, dan Disdukcapil
				Melakukan Validasi data kepesertaan BPJS dan update data kependudukan bagi warga yang telah meninggal dunia	Data	Tersedianya data kepesertaan yang update	1	-	-	-	1	Terkait	-	Dinss Kesehatan	Bidang Yankes, BPJS dan Disdukcapil dan Dinsos
Masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan terutama dari masyarakat kelas menengah ke bawah	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dimana semua masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	57221	Melakukan Pembayaran Bantuan Iuran BPJS PBI APBD	Orang	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	57221	57221	57221	57221	57221	Terkait	51.145.144.600	Dinss Kesehatan	Bidang Yankes
		Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi.	69279	Melakukan Pembayaran Bantuan Iuran BPJS PBI APBD Terintegrasi	Orang	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	69279	69279	69279	69279	69279	Terkait		Dinas Kesehatan	Bidang Yankes
Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan bersertifikat	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina/dilatih	10	Melaksanakan Pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif	usaha	Jumlah usaha Ekonomi Kreatif	-	-	10	-	10	Pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Rp. 49.700.000,-	Kepala Bidang P3Ekraf	Disparbudora
Siswa siswi sekolah belum seluruhnya merasakan layanan antar jemput bus sekolah	Tersedianya sarana angkutan umum untuk angkutan orang yang di sediakan oleh pemda	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)	313.200	Pengadaan bus sekolah	unit	Jumlah angkutan yang disediakan	-	-	-	-	-	terkait	2.783.830.000	Disas Perhubungan	Bid. Hub Darat
				Pemeliharaan bus sekolah	unit	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	27	27	27	27	27	terkait		Dinas Perhubungan	Bid. Hub. Darat
				Pengoperasian bus sekolah	orang	Jumlah orang yang di angkut	78.300	78.300	78.300	78.300	313.200	terkait		Dinas Perhubungan	Bid. Hub. Darat

Masih belum terwujudnya ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatnya Ketersediaan Air minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase penduduk berakses air minum (%)	60,18	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (SR)	0	0	0	1000	1000	Terkait	Rp. 2.250.000.000	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	97,4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan setempat	SR	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (SR)	0	0	0	1500	1500	Terkait	Rp. 11.550.000.000	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Masih kurangnya kompetensi calon tenaga kerja	Tersedianya Calon tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	146	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	-	30	30	-	60	Terkait	1.099.266.255	Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
					Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 (SIO)	-	-	-	70	70	Terkait		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
					Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	-	-	16	-	16	Terkait		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
Masih Kurangnya keterampilan dan peluang usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Meningkatnya keterampilan bagi Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri yang mendapatkan Pelatihan (orang)	40	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	-	-	40	-	40	Terkait	157.892.100	Dinas Transnaker	Bidang pemberdayaan Tenaga Kerja
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kalaena	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan kinerja partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Terkait	Rp.72.571.600	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-kecamatan Kalaena dan Stakeholder terkait
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Orang	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan	140	-	-	-	-	Terkait	Rp.10.164.300	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-kecamatan Kalaena, Stakeholder terkait dan seluruh tokoh masyarakat

			anaan pemba ngunan dan pember dayaan masyar akat yang dilaksa nakan													
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	49	49	49	49	49	Terkait	Rp.62.407.300	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-Kecamatan Kalaena, Kader PKK Kecamatan dan Desa serta Stakeholder terkait	
Kualitas pembangunan kawasan pedesaan yang belum merata	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Pers enta se peni ngk atan Kual itas pem ban gun an kaw asa n ped esa an	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Terkait	Rp.19.938.700	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait	
				Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	7	-	-	7	7	Terkait	Rp.12.069.800	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait	
				Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Desa	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	7	7	7	7	7	Terkait	Rp.7.868.900	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait	

Kurang partisipasi peran stake holder eksternal	Meningkatnya partisipasi peran stakeholder eksternal	Jumlah Stakeholder eksternal yang berpartisipasi	2 (dua) Stakeholder Eksternal (Perusahaan Pertambangan)	Melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal	Jumlah	Notulen rapat hasil koordinasi	1				2	Terkait	Rp. 300.000.00	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili & Perusahaan Pertambangan di Kec. Malili
				Merumuskan rencana tindaklanjut	Jumlah	Berita acara rencana tindak lanjut	1				1	Terkait	Rp. 300.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili & Perusahaan Pertambangan di Kec. Malili
				Melakukan MoU Pemerintah Kecamatan dengan Pihak eksternal	Jumlah	Nota perjanjian kerjasama	1				1	Terkait	Rp. 300.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili & Perusahaan Pertambangan di Kec. Malili
				Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	%	Persentase capaian hasil kegiatan	-	87%	89%	89%	88,3%	Terkait	Rp. 300.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili & Perusahaan Pertambangan di Kec. Malili
Kurang partisipasi peran stakeholder	Meningkatnya partisipasi peran stakeholder	Jumlah Stakeholder yang berpartisipasi	2 (dua) Swasta Perbankan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder	Jumlah	Notulen rapat hasil koordinasi	1				2	Terkait	Rp. 350.000.00	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan, Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti
				Merumuskan rencana tindaklanjut	Jumlah	Berita acara rencana tindak lanjut	1				1	Terkait	Rp. 350.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan, Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti
				Melakukan MoU Pemerintah Kecamatan dengan Pihak swasta	Jumlah	Nota perjanjian kerjasama	1				1	Terkait	Rp. 350.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan, Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti
				Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	%	Persentase capaian hasil kegiatan	-	87%	89%	89%	88,3%	Terkait	Rp. 350.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan, Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

TEMA : PENGENTASAN KEMISKINAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/st akeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Banyaknya orang miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas	Meningkatnya Pemberdayaan sosial kepada masyarakat melalui bantuan usaha KUBE	sentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	43,93 %	Pemberian bantuan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui KUBE (kelompok		40			40	Terkait	Rp 1.000.000.000	Dinsos P3A	Seluruh unit kerja terkait
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Kepada PMKS	sentase Jumlah warga negara Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Tersedia data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar dan Gepeng yang Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	orang	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM				26173	26173	Terkait	Rp 670.000.000	Dinsos P3A	Seluruh unit kerja terkait
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya PMKS yang ditangani	sentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)	100 %	Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga,Masyarakat,Dinas Sosial,Rumah Singgah/Shelte	10	65	15	15	105	Terkait	Rp. 75.000.000	Dinsos P3A	Seluruh unit kerja terkait

						r dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial									
Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal	Meningkatnya penanganan bencana alam dan bencana sosial	sentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Terlaksananya bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Orang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	50	75	75	75	275	Terkait	Rp. 320.000.000	Dinsos P3A	Seluruh unit kerja terkait
Si banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak	Menurunnya Rasio Korban tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	upan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	81,82	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Kasus	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	3	3	3	4	13	Terkait	Rp. 470.000.000	Dinsos P3A	Seluruh unit kerja terkait
Pertumbuhan penduduk yang belum Optimal	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,47	Meningkatkan Cakupan Pengguna Alat Kontrasepsi	%	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	58.90	58.90	58.90	58.90	58.90	Terkait	5.369.466.441,00	DPPKB	Bidang dalduk dan KB
				Menyediakan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Faskes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon	21	21	21	21	21	Terkait	1.837.634.576,00	DPPKB	Bidang KB
				Meningkatkan Advokasi, KIE kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Orang	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	40				40	terkait	95.000.000,00	DPPKB	Bidang KB
				Melakukan Penyuluhan KB pada PUS	Orang	Jumlah PUS Ikut penyuluhan KB	762	762	762	762	3048	terkait	296.000.000,00	DPPKB	Bidang KB

				Melakukan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan kepada Tenaga Lapangan (PKB, PLKB PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang	Jumlah PKB, PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	681	681	681	681	681	terkait	1.493.689.000,00	DPPKB	Bidang Daldujk
1. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Luwu Timur masih berada pada kelas risiko tinggi	Meningkatnya Ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,46	Pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	Nilia IKD	-	-	-	0,46	0,46	Terkait dengan stakeholder	Rp. 62.553.580	BPBD	BPBD
2. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 625.230.900	BPBD	BPBD & OPD Terkait
3. Bencana dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan				Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase jumlah korban laki -laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 39.175.000	BPBD	BPBD & OPD Terkait
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 39.073.600	BPBD	BPBD & OPD Terkait
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 20.460.600	BPBD	BPBD & OPD Terkait

				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	%	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100	100	100	100	100	Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 28.797.040	BPBD	BPBD & OPD Terkait
Terjadinya penurunan angka partisipasi sekolah	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	63%	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Usia 5-6 Tahun				63	63	terkait	11.799.611.405	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar Usia 7-12 Tahun				100	100	terkait	96.191.198.454	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan serta Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Usia 13-15 Tahun				100	100	terkait	62.829.949.475	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	Menuntaskan Kejar Paket A, B, dan C	%	Persentase Siswa yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun				100	100	terkait	4.393.514.963	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rendahnya kemampuan UMKM dalam mengelolah usaha	Meningkatnya kemampuan UMKM dalam mengelolah usaha	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	70	Melaksanakan pelatihan UMKM	UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih	-	70	-	-	70	terkait	79.836.440	Disdagkoprin um	Bid. UMKM

Masih banyaknya orang miskin di wilayah pesisir	Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat pesisir (Kelompok)	40 Kelompok	Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan	Kelompok	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan	-	2	10	3	15		Rp1.400.000.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
				Pemberian benih unggul serta sarana dan penunjangnya	Kelompok	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	-	10	10	-	20		Rp2.000.000.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
				Pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan	Kelompok	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	-	3	2	-	5		Rp790.000.000	Dinas Perikanan	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
Terjadi penurunan produktivitas tanaman pertanian	Jumlah produktivitas Padi	7.16 Ton/Ha	Penggunaan benih varietas unggul		Kg	Jumlah benih padi yang diadakan		250,000			250,000.00	Terkait	3,250,000,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja
	Jumlah produktivitas Jagung	6.71 Ton/Ha	pengendalian serangan hama & penyakit tanaman		%	Persentase OPT tanaman pangan yang dikendalikan		95.00			95.00	Terkait	448,910,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja
	Jumlah produktivitas Kakao	0.86 Ton/Ha			%	presentase pengendalian tingkat serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan		95.00			95.00	Terkait	26,250,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja
	Jumlah produktivitas Kelapa Sawit	9.6 Ton/Ha	AUTP		Ha	Jumlah luas lahan yang diasuransikan			500.00		500.00	Terkait	18,000,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja

	Jumlah produktivitas Lada	0.99 Ton/Ha	Intensifikasi tanaman perkebunan		Ha	Jumlah lahan perkebunan yang diintensifikasi				429.00	429.00	Terkait	1,716,000,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja
			Pembangunan kolam perendaman lada		Unit	Jumlah Kolam Perendaman Merica yang dibangun				2.00	2.00	Terkait	400,000,000.00	DISPKP	Seluruh Unit Kerja
Data Penerima Bantuan Iuran PBI APBD dan PBI Integrasi yang telah meninggal dunia dan tidak dilakukan pelaporan kepada dinas kesehatan	Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran yang Update	Tersedianya data penerima bantuan Iuran PBI APBD dan PBI Integrasi yang Valid	Dokumen MoU dan Data Penerima Bantuan Iuran yang terupdate	Melaksanakan Penandatanganan MoU dengan pihak BPJS Kesehatan dan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	Berkas	Tersedianya MoU dengan pihak BPJS dan Disdukcapil	2	-	-	-	2	Terkait	-	DINKES	Bidang Yankes, BPJS, dan Disdukcapil
				Melakukan Validasi data kepesertaan BPJS dan update data kependudukan bagi warga yang telah meninggal dunia	Data	Tersedianya data kepesertaan yang update	1	-	-	-	1	Terkait	-	DINKES	Bidang Yankes, BPJS dan Disdukcapil dan Dinsos
Masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan terutama dari masyarakat kelas menengah ke bawah	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dimana semua masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	60082	Melakukan Pembayaran Bantuan Iuran BPJS PBI APBD	Orang	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	60082	60082	60082	60082	60082	Terkait	75.703.590.200	DINKES	Bidang Yankes
		Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi.	69279	Melakukan Pembayaran Bantuan Iuran BPJS PBI APBD Terintegrasi	Orang	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD.	69279	69279	69279	69279	69279	Terkait		DINKES	Bidang Yankes
Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu	Berkurangnya Masyarakat kurang mampu yang tidak bekerja	Jumlah masyarakat kurang mampu yang bekerja sebagai tenaga kebersihan	129	Penerimaan tenaga kerja kebersihan	Orang	Jumlah tenaga kebersihan	129	129	129	129	129	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di	4.161.600.000.00	DLH	UPTD pengelolaan kebersihan dan persampahan

												TPA/TPST/SPA kabupaten/kota			
Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan untuk berusaha	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengurus dokumen lingkungan	15	Pengurusan dokumen ijin lingkungan	usaha/ kegiatan	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi	2	3	5	5	15		35.000.000,00	DPMPTSP	DLH dan Tim teknis dokumen lingkungan
Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan bersertifikat	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina/dilatih	15	Melaksanakan Pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif	usaha	Jumlah usaha Ekonomi Kreatif	-	-	15	-	15	Pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Rp. 72.000.000,-	Kepala Bidang P3Ekraf	Disparbudora
Siswa siswi sekolah belum seluruhnya merasakan layanan antar jemput bus sekolah	Tersedianya sarana angkutan umum untuk angkutan orang yang di sediakan oleh pemma	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemma (orang)	324.000	Pengadaan bus sekolah	unit	Jumlah angkutan yang disediakan	-	1	-	-	1	terkait	2.783.830.000	Dishub	Bid. Hub. Darat
				Pemeliharaan bus sekolah	unit	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	28	28	28	28	28	terkait		Dishub	Bid. Hub. Darat
				Pengoperasian bus sekolah	orang	Jumlah orang yang di angkut	81.000	81.000	81.000	81.000	324.000	terkait		Dishub	Bid. Hub. Darat
Masih kurangnya kompetensi calon tenaga kerja	Tersedianya Calon tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	146	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	-	30	30	-	60	Terkait	1.099.566.255	Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
					Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 (SIO)	-	-	70	-	70	Terkait		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
					Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	-	16	-	-	16	Terkait		Dinas Transnaker	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan	Meningkatnya Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan kinerja	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang	100	100	100	100	100	Terkait	Rp.100.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-kecamatan Kalaena dan Stakeholder

pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Kalaena		partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan	150	-	-	-	-	Terkait	Rp.20.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-Kecamatan Kalaena, Stakeholder terkait dan seluruh tokoh masyarakat
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	49	49	49	49	49	Terkait	Rp.80.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa se-Kecamatan Kalaena, Kader PKK Kecamatan dan Desa serta Stakeholder terkait
Kualitas pembangunan kawasan pedesaan yang belum merata	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan Kualitas pembangunan kawasan pedesaan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Terkait	Rp.35.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait

				Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	7	-	-	7	7	Terkait	Rp.20.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait
				Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Desa	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	7	7	7	7	7	Terkait	Rp.15.000.000	Pemerintah Kecamatan Kalaena	Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait
Kurang partisipasi peran stake holder eksternal	Meningkatnya partisipasi peran stakeholder eksternal	Jumlah Stakeholder eksternal yang berpartisipasi	Seluruh Stakeholder Eksternal. (Plhak Perbankan dan Perusahaan) melalui dana CSR	Melaksanakan rapat koordinasi serta pemaparan hasil Tahun 2023 dan evaluasi	Jumlah	Notulen hasil rapat	2	-	-	-	2	Terkait	Rp. 500.000.	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili, Perusahaan Perbankan dan Pertambangan di Kec. Malili
				Melakukan persamaan persepsi dan rencana tindak lanjut	Jumlah	Berita acara rencana tindak lanjut	-	1	-	-	1	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili, Perusahaan Perbankan dan Pertambangan di Kec. Malili
				Melakukan MoU Pemerintah Kecamatan dengan Pihak eksternal	Jumlah	Nota perjanjian kerjasama	-	1	-	-	1	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili, Perusahaan Perbankan dan Pertambangan di Kec. Malili
				Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	%	Persentase capaian hasil kegiatan	-	88%	90%	92%	90%	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN MALILI	Pemerintah Kelurahan/Desa se-Kec. Malili, Perusahaan Perbankan dan Pertambangan di Kec. Malili
Kurangnya efektifitas peran stakeholder	Meningkatnya efektifitas peran stakeholder	Efektifitas Stakeholder dalam berpartisipasi pengentasan	1 (satu) Program dan kegiatan	Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi	Jumlah	Notulen hasil rapat	1	-	-	-	2	Terkait	Rp. 500.000.	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan, Desa se-Kec. Towuti,

		Kemiskinan	n melalui dana CSR tepat guna dan tepat sasaran serta bersifat berkelanjutan	Merumuskan strategi kegiatan yang bersifat sustainability (berkelanjutan)	Jumlah	Berita acara rencana tindak lanjut	-	1	-	-	1	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti
				Membuat roadmap kegiatan melalui dana CSR (merubah tata kelola csr sebelumnya)	Jumlah	Peraturan Bupati	-	1	-	-	1	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti dan Dinas Terkait
				Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	%	Persentase capaian hasil kegiatan	-	88%	90%	92%	90%	Terkait	Rp. 500.000	PEMERINTAH KECAMATAN TOWUTI	Pemerintah Kecamatan Desa se-Kec. Towuti, Perusahaan, Perbankan di Kec. Towuti dan Dinas Terkait

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

TEMA : PENINGKATAN REALISASI INVESTASI

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan bersertifikat	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina/dilatih	10	Melaksanakan Pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif	usaha	Jumlah usaha Ekonomi Kreatif	-	-	10	-	10	Pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Rp. 49.700.000,-	Kepala Bidang P3Ekraf	Disparmudora
Lamanya Proses Izin Berusaha	Meningkatnya Proses Izin Berusaha	Rata-Rata Lama Waktu Perizinan.	30 Menit	Menyederhanakan SOP	Jumlah	Jumlah SOP yang disederhanakan	-	1		-	1	Terkait	Rp 48.000.000	DPMPTSP	Bidang PTSP
				Mempersingkat Waktu Penyelesaian Izin	%	Persentase Jumlah Izin yang terselesaikan sesuai SOP	75%	75%	75%	75%	75%	Terkait	Rp 269.588.200	DPMPTSP	Bidang PTSP
Kurangnya Publikasi Potensi Unggulan	Meningkatnya Rencana Investasi	jumlah Rencana Investasi		Melakukan Strategi Promosi	Laporan	Jumlah Laporan		1		1	2	terkait	Rp 22.638.490	dpmptsp	bidang penanaman modal
				Melakukan/ Mengikuti Pameran Potensi Unggulan	event	Jumlah Pameran Investasi			1		1	terkait	Rp 133.600.000	dpmptsp	bidang penanaman modal
kurang sinkronnya regulasi investasi	Meningkatnya jumlah investor	jumlah investor baru	45	Menyusunan Regulasi Investasi	Dokumen	Jumlah Regulasi		1			1	terkait	Rp 44.060.000	dpmptsp	bidang penanaman modal
				Mengevaluasi Pelaksanaan regulasi	Kegiatan	Jumlah Laporan		1		1	2	terkait	Rp 42.134.290	dpmptsp	bidang penanaman modal
				Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dan diawasi		70	105	70	244	Tidak Terkait	Rp 469.500.000	dpmptsp	Didang Dalak

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

TEMA : PENINGKATAN REALISASI INVESTASI

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan untuk berusaha	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengurus dokumen lingkungan	15	Pengurusan dokumen ijin linbkgungan	usaha/ kegiatan	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi	2	3	5	5	15		35.000.000,00	DLH	DLH dan Tim teknis dokumen lingkungan
Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu	Berkurangnya Masyarakat kurang mampu yang tidak bekerja	Jumlah masyarakat kurang mampu yang bekerja sebagai tenaga kebersihan	129	Penerimaan tenaga kerja kebersihan	Orang	Jumlah tenaga kebersihan	129	129	129	129	129	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	4.161.600.000,00	DLH	UPTD pengelolaan kebersihan dan persampahan
Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan bersertifikat	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih	15	Melaksanakan Pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif	usaha	Jumlah usaha Ekonomi Kreatif	-	-	15	-	15	Pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Rp. 72.000.000,-	Kepala Bidang P3Ekraf	Disparmudora
Lamanya Proses Izin Berusaha	Meningkatnya Proses Izin Berusaha	Rata-Rata Lama Waktu Perizinan.	30 Menit	Melakukan Sosialisasi Perda/SOP	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kecamatan	-	5	6	-	11	Tidak Terkait	Rp 50.000.000	DPMPPTSP	Bidang PTSP
				Mempersingkat Waktu Penyelesaian Izin	%	Persentase Jumlah Izin yang terselesaikan sesuai SOP	77%	77%	77%	77%	77%	Terkait	Rp 350.097.000	DPMPPTSP	Bidang PTSP
				Melakukan Strategi Promosi	Laporan	Jumlah Laporan		1	1	1	3	terkait	Rp 42.436.000	dpmptsp	bidang penanaman modal

				Melakukan/ Mengikuti Pameran Potensi Unggulan	event	Jumlah Pameran Investasi		1	1		2	terkait	Rp 371.315.000	dpmptsp	bidang penanaman modal
kurang sinkronnya regulasi investasi	Meningkatnya jumlah investor	jumlah investor baru	45	Menyediakan Peta Potensi Sektor Unggulan Kabupaten	Dokumen	Jumlah Peta Potensi			1		1	terkait	Rp 190.000.000	dpmptsp	bidang penanaman modal
				Mengevaluasi Pelaksanaan regulasi	Kegiatan	Jumlah Laporan		1		1	2	terkait	Rp 65.157.859	dpmptsp	bidang penanaman modal
				Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dan diawasi		70	105	70	244	Tidak Terkait	Rp 381.924.000	dpmptsp	Didang Dalak

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

TEMA : DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Kurang optimalnya penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan - Kurangnya ketersediaan infrstruktur pembayaran	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak	Transaksi berbasis digital	5	Mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD yang merupakan program Nasional	Objek Pajak dan Retribusi	Transaksi berbasis digital	1	1	2	1	5	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Bapenda dan OPD Pengelola Retribusi	Bapenda dan OPD pengelola Retribusi
Belum Optimalnya Proses Penyusunan Perencanaan APBD	Meningkatnya Tata kelola Keuangan Daerah melalui SIPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	60 Hari	Peningkatan Kapasitas/Caoching Klinik bagi perencana SKPD	Jumlah	Jumlah Perencana yang di Coaching			59	59	59	Terkait Langsung	22.000.000	BKAD	Seluruh SKPD
				Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	Terkait Langsung	152.670.000	BKAD	Seluruh SKPD.
				Peningkatan Kapasitas/Bimtek bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah	Jumlah TAPD yang di Bimtek			50		50	Terkait Langsung	295.000.000	BKAD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
<i>Layanan Cuti terhadap ASN yang belum efektif</i>	Meningkatnya sistem Layanan Cuti kepada seluruh ASN dengan mudah cepat dan tepat waktu melalui Aplikasi Siyanti	Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu	80%	<i>Menyusun dan membuat aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)</i>	<i>Aplikasi</i>	Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu	100%				100%	Tidak terkait	<i>Rp. 35.000.000</i>	<i>BKPSDM</i>	<i>BKPSDM</i>
				<i>Melakukan sosialisasi penerapan Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)</i>	<i>Pertemuan</i>	Pesentase Capaian Penggunaan Aplikasi dengan efektif	75%	80%	90%	100%	100%	Tidak terkait	<i>Rp. 5.000.000</i>	<i>BKPSDM</i>	<i>BKPSDM</i>

				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)	Oncall	Presentase Capaian Penggunaan Aplikasi dengan Mahir	75%	80%	90%	100%	100%	Tidak terkait	-	BKPSDM	BKPSDM
Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM yang belum efektif	Meningkatnya sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM secara efektif dan efisien melalui Aplikasi Titah Abah	Persentase capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM yang akuntabel	80%	1. Menyusun dan membuat aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (TITAH ABABH) 2. Melakukan sosialisasi penerapan aplikasi Titah Abah lingkup BKPSDM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Titah Abah	%	Persentase Capaian penggunaan aplikasi Titah Abah yang efektif dan akuntabel	75%	76%	78%	80%	80%	Tidak terkait	Rp. 35.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan yang belum efektif	Meningkatnya sistem pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan secara efektif dan efisien (Aplikasi SIJAKUNG)	Persentase capaian pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel	80%	1. Menyusun dan membuat aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Keuangan (Sijakung) 2. Melakukan sosialisasi penerapan aplikasi Sijakung lingkup BKPSDM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Sijakung	%	Persentase Capaian penggunaan aplikasi Sijakung yang efektif dan akuntabel	75%	76%	78%	80%	80%	Tidak terkait	Rp. 40.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Tingginya penggunaan ATK dalam administrasi Pemerintahan	Menurunnya jumlah penggunaan kertas (less paper)	Presentase administrasi surat yang menggunakan aplikasi srikandi	70%	Semua surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi srikandi	Persen	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang menggunakan srikandi	40	40	40	50	170	Tidak Terkait	Rp.xxx.xxx	Inspektorat	Seluruh unit kerja terkait
Masyarakat belum mengetahui fungsi dari Identitas Kartu Digital	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kartu digital	Identitas Kartu Digital	25	Sosialisasi Identitas Kartu digital kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1		0	0	0		Rp. 65.545.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan dan pemanfaatan data
Belum Optimalnya penggunaan Digitalisasi Pemerintahan di Unit	Meningkatnya penggunaan Digitalisasi Administrasi	Jumlah Unit Kerja yang menggunakan Digitalisasi Administrasi		Pendataan Tanda tangan Elektronik Kepala UPT (Puskesmas dan Koordinator BPP	UPT + BPP	Jumlah UPT + BPP	0	0	29	0	29	Terkait	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)

Kerja serta Masih kurangnya Sumber Daya	Pemerintahan	Pemerintahan	18 UPT (PUSKE SMAS) + 11 BPP	Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Srikandi	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	0	0	116	0	116	Tidak Terkait	100.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
				Implementasi Penggunaan Aplikasi Srikandi	UPT + BPP	Jumlah UPT + BPP	0	0	18	11	29.	Tidak Terkait	10.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
				Monitoring dan evaluasi penggunaan Aplikasi Srikandi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
Pengisian Riwayat pengobatan pasien pada ERM SIMRS tidak lengkap dan benar	Meningkatnya kelengkapan pengisian Riwayat pengobatan pasien pada aplikasi ERM SIMRS	Presentase keterisian form ERM SIMRS secara lengkap dan benar oleh tenaga kesehatan	80%	Meng-update form ERM SIMRS	Aplikasi	Persentase ketersediaan form ERM sesuai kebutuhan				100%	100%	Tidak terkait	Rp. 66.000.000	RSUD	Unit SIMRS
				Melakukan uji petik pada berkas ERM SIMRS	Berkas	Persentase pengisian form ERM secara lengkap dan benar	70%	80%	90%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Unit RM dan SIMRS
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan pengisian form ERM SIMRS	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 1.000.000	RSUD	Unit RM dan SIMRS
Penulisan resep obat pasien masih secara konvensional	Meningkatnya penulisan resep obat pasien melalui aplikasi ReDi SIMRS	Presentase penggunaan ReDi SIMRS oleh Dokter di unit pelayanan	85%	Meng-update stock obat secara realtime pada ReDi SIMRS	Aplikasi	Persentase kesesuaian stock obat di Depo Apotik dengan ReDi SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 66.000.000	RSUD	Instalasi Farmasi
				Pengadaan sarana penunjang untuk implementasi ReDi SIMRS	Buah	Persentase ketersediaan sarana penunjang ReDi SIMRS				50%	50%	Tidak terkait	Rp. 150.000.000,-	RSUD	Bidang Sanpra dan SIMRS
				Melakukan rekapitulasi penggunaan ReDi SIMRS	Lembar	Persentase penggunaan ReDi SIMRS oleh Dokter	85%	90%	95%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Instalasi Farmasi dan SIMRS
Lambatnya tindak lanjut pada keluhan kerusakan sarana dikarenakan tidak teregist dalam Sistem Keluhan Online (SKO) SIMRS	Meningkatnya tindak lanjut terhadap keluhan kerusakan sarana dalam aplikasi SKO SIMRS	Presentase tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk pada aplikasi SKO SIMRS	85%	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut pada SKO SIMRS	Keluhan	Persentase tindak lanjut keluhan pada SKO SIMRS	85%	90%	95%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Unit IPSRS dan SIMRS
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan pada SKO SIMRS	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 1.000.000,-	RSUD	Unit IPSRS dan SIMRS
Keterlambatan pengajuan klaim BPJS	Meningkatnya kecepatan pengajuan klaim ke BPJS menggunakan	Presentase waktu pengajuan klaim BPJS sebelum tanggal 15 bulan berikutnya	50%	Meng-upload berkas pengajuan klaim BPJS dari SIMRS ke E-Klaim	Aplikasi	Persentase jumlah dokumen klaim yang ter-	50%	50%	100%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Seluruh Ruangan

	aplikasi E-Klaim	melalui aplikasi E-Klaim				upload										
				<i>Bridging SIMRS dengan Aplikasi INACBgs Kemenkes</i>	Aplikasi	Presentase proses bridging				50%	50%	Tidak terkait	<i>Rp. 66.000.000,-</i>	<i>RSUD</i>	<i>SIMRS</i>	
				<i>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses upload dokumen klaim</i>	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	<i>Rp. 1.000.000,-</i>	<i>RSUD</i>	<i>Unit Pengajuan Klaim dan SIMRS</i>	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah belum efektif	Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai standar	persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selesai tepat waktu	80 %	Menyusun dan membuat dokumen perencanaan perangkat daerah dengan tepat dan sesuai standar	%	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai standar	80	80	90	90	90	Terkait	Rp. 14.779.860	Camat	Unsur Staf Kecamatan Mangkutana	
Kualitas SDM ASN belum memadai	Meningkatnya kualitas SDM ASN melalui Bimtek	persentase ASN yang telah mengikuti bimtek	2	Peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek	jumlah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	1	1	-	2	Terkait	Rp. 17.850.500	Camat	Unsur Staf Kecamatan Mangkutana	
Pelaporan evaluasi kinerja belum efektif	Meningkatnya system pelaporan eveluasi kinerja yang tepat waktu	persentase capaian pelaporan evaluasi kinerja	80 %	Melakukan evaluasi kinerja	%	Persentase capaian kinerja pegawai	80	85	85	90	90	Terkait	Rp. 12.504.500	Camat	Unsur staf Kecamatan Mangkutana	

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

TEMA : DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Kurang optimalnya penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan Kurangya ketersediaan infrstruktur pembayaran	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak	Transaksi berbasis digital	2	Mewujudkan Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD yang merupakan program Nasional	Objek Pajak dan Retribusi	Transaksi berbasis digital	1	1	-	-	2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Bapenda dan OPD Pengelola Retribusi	Bapenda dan OPD pengelola Retribusi
Belum Optimalnya Proses Peunyusunan Perencanaan APBD	Meningkatnya Tata kelola Keuangan Daerah melalui SIPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	60 Hari	Peningkatan Kapasitas/Caoching Klinik bagi perencana SKPD	Jumlah	Jumlah Perencana yang di Coaching			59	59	59	Terkait Langsung	25.000.000	BKAD	Seluruh SKPD
				Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	Terkait Langsung	155.000.000	BKAD	Seluruh SKPD.
				Peningkatan Kapasitas/Bimtek bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah	Jumlah TAPD yang di Bimtek			60		60	Terkait Langsung	355.000.000	BKAD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
<i>Layanan Cuti terhadap ASN yang belum efektif</i> <i>Layanan Cuti terhadap ASN yang belum efektif</i>	Meningkatnya sistem Layanan Cuti kepada seluruh ASN dengan mudah cepat dan tepat waktu melalui Aplikasi Siyanti Meningkatnya sistem Layanan	Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu	80% 80%	<i>Menyusun dan membuat Penambahan fitur aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)</i>	Fitur	Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu	100%				100%	Tidak terkait	Rp. 15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				<i>Melakukan sosialisasi penerapan Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)</i>	Pertemuan	Persentase Capaian Penggunaan Aplikasi dengan efektif	75%		90%		100%	Tidak terkait	Rp. 5.000.000	BKPSDM	BKPSDM

	Cuti kepada seluruh ASN dengan mudah cepat dan tepat waktu melalui Aplikasi Siyanti			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)	Oncal	Presentase Capaian Penggunaan Aplikasi dengan Mahir	75%		90%		100%	Tidak terkait	-	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dan membuat Penambahan fitur aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SIYANTI)	Fitur	Persentase capaian ASN yang proses cutinya selesai tepat waktu	100%				100%	Tidak terkait	Rp. 15.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM yang belum efektif	Meningkatnya sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM secara efektif dan efisien melalui Aplikasi Titah Abah	Persentase capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah BKPSDM yang akuntabel	85%	1. Menyusun dan membuat aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (TITAH ABAH) 2. Melakukan sosialisasi penerapan aplikasi Titah Abah lingkup BKPSDM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Titah Abah	%	Persentase Capaian penggunaan aplikasi Titah Abah yang efektif dan akuntabel	81%	83%	84%	85%	85%	Tidak terkait	Rp. 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan yang belum efektif	Meningkatnya sistem pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan secara efektif dan efisien (Aplikasi SIJAKUNG)	Persentase capaian pelaporan evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel	85%	1. Penambahan fitur aplikasi Sijakung sesuai dengan kebutuhan 2. Melakukan sosialisasi penerapan aplikasi Sijakung lingkup BKPSDM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Sijakung	%	Persentase Capaian penggunaan aplikasi Sijakung yang efektif dan akuntabel	81%	83%	84%	85%	85%	Tidak terkait	Rp. 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Tingginya penggunaan ATK dalam administrasi Pemerintahan	Menurunnya jumlah penggunaan kertas (less paper)	Presentase administrasi surat yang menggunakan aplikasi srikandi	75%	Semua surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi srikandi	Perse n	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang menggunakan srikandi	45	45	45	60	195	Tidak Terkait	Rp.xxx.xxx	Inspektorat	Seluruh unit kerja terkait
Masyarakat belum mengetahui fungsi dari Identitas Kartu Digital	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kartu digital	Identitas Kartu Digital	30 %	Sosialisasi Identitas Kartu digital kependudukan	Lap ora n	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka	1		0	0	0		Rp. 65.000.000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependuduk an dan pemanfaatan

					n										data
- Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai seperti computer dan RAM yang digunakan spesifikasinya masih standar - Keterbatasan kemampuan SDM dalam melakukan digitalisasi arsip	Jumlah Arsip Statis yang didigitalisasi	Tercapainya Digitalisasi Arsip Statis	1000 berkas	Melakukan Penelusuran Arsip Statis	OPD	Jumlah Informaso Arsip Statis	5	24	11	-	40	Tidak Terkait	Rp. 24,640,000	DPK	Bidang Kearsipan
				Memverifikasi Arsip Statis	Berkas	Jumlah Berkas Arsip Statis	-	500	500	-	1000				
				Mengidentifikasi Arsip Statis	Berkas	Jumlah Berkas Arsip Statis	-	500	500	-	1000				
				Melakukan Pengelolaan dan Pemberkasan Arsip Statis secara elektronik	Berkas	Jumlah arsip statis yang dikelola secara elektronik	-	500	500	-	1000				
Belum Optimalnya penggunaan Digitalisasi Pemerintahan di Unit Kerja serta Masih kurangnya Sumber Daya	Meningkatnya penggunaan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Jumlah Unit Kerja yang menggunakan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	128 Desa/Kelurahan	Pendataan Tanda tangan Elektronik Kepala Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0	128	0	128	Terkait	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
				Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Srikandi	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	0	0	128	0	128	Tidak Terkait	150.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
				Implementasi Penggunaan Aplikasi Srikandi	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0	128	0	128	Tidak Terkait	10.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
				Monitoring dan evaluasi penggunaan Aplikasi Srikandi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	20.000.000	DISKOMINFO-SP	DISKOMINFO-SP (BIDANG APTIKA)
Pengisian Riwayat pengobatan pasien pada ERM SIMRS tidak lengkap dan benar	Meningkatnya kelengkapan pengisian Riwayat pengobatan pasien pada aplikasi ERM SIMRS	Presentase keterisian form ERM SIMRS secara lengkap dan benar oleh tenaga kesehatan	80%	Meng-update form ERM SIMRS	Aplikasi	Persentase ketersediaan form ERM sesuai kebutuhan				100%	100%	Tidak terkait	Rp. 66.000.000	RSUD	Unit SIMRS
				Melakukan uji petik pada berkas ERM SIMRS	Berkas	Persentase pengisian form ERM secara lengkap dan benar	80%	85%	90%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Unit RM dan SIMRS
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan pengisian form ERM SIMRS	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 1.000.000	RSUD	Unit RM dan SIMRS
Penulisan resep obat pasien masih secara konvensional	Meningkatnya penulisan resep obat pasien melalui aplikasi ReDi SIMRS	Presentase penggunaan ReDi SIMRS oleh Dokter di unit pelayanan	85%	Meng-update stock obat secara realtime pada ReDi SIMRS	Aplikasi	Persentase kesesuaian stock obat di Depo Apotik	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 66.000.000	RSUD	Instalasi Farmasi

						dengan ReDi SIMRS										
				Pengadaan sarana penunjang untuk implementasi ReDi SIMRS	Buah	Presentase ketersediaan sarana penunjang ReDi SIMRS				100%	100%	Tidak terkait	Rp. 150.000.000,-	RSUD	Bidang Sanpra dan SIMRS	
				Melakukan rekapitulasi penggunaan ReDi SIMRS	Lembar	Presentase penggunaan ReDi SIMRS oleh Dokter	85%	90%	95%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Instalasi Farmasi dan SIMRS	
Lambatnya tindak lanjut pada keluhan kerusakan sarana dikarenakan tidak teregist dalam Sistem Keluhan Online (SKO) SIMRS	Meningkatnya tindak lanjut terhadap keluhan kerusakan sarana dalam aplikasi SKO SIMRS	Presentase tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk pada aplikasi SKO SIMRS	85%	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut pada SKO SIMRS	Keluhan	Presentase tindak lanjut keluhan pada SKO SIMRS	85%	90%	95%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Unit IPSRS dan SIMRS	
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan pada SKO SIMRS	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 1.000.000,-	RSUD	Unit IPSRS dan SIMRS	
Keterlambatan pengajuan klaim BPJS	Meningkatnya kecepatan pengajuan klaim ke BPJS menggunakan aplikasi E-Klaim	Presentase waktu pengajuan klaim BPJS sebelum tanggal 15 bulan berikutnya melalui aplikasi E-Klaim	100%	Meng-upload berkas pengajuan klaim BPJS dari SIMRS ke E-Klaim	Aplikasi	Persentase jumlah dokumen klaim yang ter-upload	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	-	RSUD	Seluruh Ruangan	
				Bridging SIMRS dengan Aplikasi INACBgs Kemenkes	Aplikasi	Presentase proses bridging				100%	100%	Tidak terkait	Rp. 66.000.000,-	RSUD	SIMRS	
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses upload dokumen klaim	Pertemuan	Persentase kehadiran perwakilan ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terkait	Rp. 1.000.000,-	RSUD	Unit Pengajuan Klaim dan SIMRS	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah belum efektif	Meningkatnya penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai standar	persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selesai tepat waktu	85 %	Menyusun dan membuat dokumen perencanaan perangkat daerah dengan tepat dan sesuai standar	%	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai standar	80	80	90	90	90	Terkait	Rp. 14.700.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Mangkutana	
Kualitas SDM ASN belum memadai	Meningkatnya kualitas SDM ASN melalui Bimtek	persentase ASN yang telah mengikuti bimtek	2	Peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek	jumlah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	1	1	-	2	Terkait	Rp. 17.800.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Mangkutana	

Pelaporan evaluasi kinerja belum efektif	Meningkatnya system pelaporan eveluasi kinerja yang tepat waktu	persentase capaian pelaporan evaluasi kinerja	85 %	Melakukan evaluasi kinerja	%	Persentase capaian kinerja pegawai	80	85	85	90	90	Terkait	Rp. 12.500.000	Camat	Unsur staf Kecamatan Mangkutana
--	---	---	------	----------------------------	---	------------------------------------	----	----	----	----	----	---------	----------------	-------	---------------------------------

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

TEMA : PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PDN)

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada setiap belanja barang dan jasa	Presentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	35%	Reviu penggunaan P3DN pada Pengadaan barang dan jasa	Paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Produk dalam negeri	10	10	-	-	20	Terkait	Rp. 116.700.000	Inspektorat	Perikanan dan Pertanian
Minimnya usaha industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas usaha	Meningkatnya persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah	30	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Izin	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi	7	8	8	7	30	terkait	30.000.000	Disdagkoprin um	Bid. Perindustrian
Sistem dan Prosedur Kerja Serta Profesonalisme Masih Rendah	Meningkatnya Profesionailsme Aparatur	Layanan Sesuai Standar	4	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Bimtek	Jumt ah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	-	2	-	4	Terkait	Rp. 15.800.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
				Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumt ah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp. 10.000.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
				Melakukan Evaluasi Kinerja	%	Persentase Capaian Kinerja Pegawai	80	85	85	90	90	Terkait	Rp. 3.711.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
Sistem dan Prosedur Kerja Serta Profesonalisme Masih Rendah	Meningkatnya Profesionailsme Aparatur	Layanan Sesuai Standar	2	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Bimtek	Jumt ah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	1	1	-	2	Terkait	Rp. 16.855.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Wotu

				Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp. 10.000.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Wotu
				Melakukan Evaluasi Kinerja	%	Persentase Capaian Kinerja Pegawai	80	85	85	90	90	Terkait	Rp. 3.337.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Wotu

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

TEMA : PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PDN)

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada setiap belanja barang dan jasa	Presentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	40%	Reviu penggunaan P3DN pada Pengadaan barang dan jasa	Paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Produk dalam negeri	10	10	-	-	20	Terkait	Rp.xxx.xxx	Inspektorat	Perikanan dan Pertanian
Minimnya usaha industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas usaha	Meningkatnya persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah	30	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Izin	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi	7	8	8	7	30	terkait	35.000.000	Disdagkoprin um	Bid. Perindustrian
Sistem dan Prosedur Kerja Serta Profesonalisme Masih Rendah	Meningkatnya Profesionailsme Aparatur	Layanan Sesuai Standar	4	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Bimtek	Juml ah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	4	Terkait	Rp. 20.520.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
				Peningkatan Sarana dan Prasarana	Juml ah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	-	3	-	2	5	Terkait	Rp. 53.500.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
				Melakukan Evaluasi Kinerja	%	Persentase Capaian Kinerja Pegawai	80	85	85	90	90	Terkait	Rp. 21.367.327	Camat	Unsur Staf Kecamatan Burau
Sistem dan Prosedur Kerja Serta Profesonalisme Masih Rendah	Meningkatnya Profesionailsme Aparatur	Layanan Sesuai Standar	2	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Bimtek	Juml ah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	4	Terkait	Rp. 36.000.000	Camat	Unsur Staf Kecamatan Wotu

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

TEMA : PENGENDALIAN INFLASI

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/sta keholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Terjadinya fliktuasi harga terutama bahan pokok	Terjaganya stabilisasi harga komoditi	Jumlah komoditi yang harganya stabil	24 Komoditi	Survei Stabilisasi Harga	Kali	Jumlah survey stabilisasi harga yang dilakukan	3	3	3	3	12	Terkait	Rp.15.000.000	Inspektorat	Koperindag
Kurangnya Ketersediaan Komoditas Penyumbang Inflasi	Meningkatkan hasil Komoditas Penyumbang Inflasi	Rata-rata Produksi dan Produktivitas Komoditas Penyumbang Inflasi.	Target Inflasi pada Kisaran 3±1	Menyajikan Laporan Terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah	Laporan Triwulan	1	1	1	1	4	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengendalian Inflasi	107.500.000,-	Setda	OPD Terkait
				Menfasilitasi Rapat terkait Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah	Rekomendasi	1.	1	1	1	.4	Koordinasi Lintas Sektor.	-	.Setda	OPD Terkait.
Terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi	Terciptanya stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	84	Melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Laporan	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	21	21	21	21	84	terkait	26.889.556	Disdagkoprinum	Bid. Perdagangan
Stok ikan yang belum terdistribusi dengan baik	Terdistribusi-nya stok ikan di wilayah Kab. Luwu Timur	Tersedianya stok ikan di setiap kecamatan	11 Kecamatan	Produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap	2.551	2.554	2.555	2.556	10.216		Rp4.382.510.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	78.815	78.927	78.969	78.999	315.710		Rp3.684.592.530	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
				Produsi hasil pengolahan ikan	Ton	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan	77	79	88	91	335		Rp926.414.480	Dinas Perikanan	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

TEMA : PENGENDALIAN INFLASI

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
Terjadinya fluktuasi harga terutama bahan pokok	Terjaganya stabilisasi harga komoditi	Jumlah komoditi yang harganya stabil	24 Komoditi	Survei Stabilisasi Harga	Kali	Jumlah survey stabilisasi harga yang dilakukan	3	3	3	3	12	Terkait	Rp.xxx.xxx	Inspektorat	Koperindag
Kurangnya Ketersediaan Komoditas Penyumbang Inflasi	Meningkatkan hasil Komoditas Penyumbang Inflasi	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Penyumbang Inflasi.	Target Inflasi pada Kisaran 3±1	Menyajikan Laporan Terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah	Laporan Triwulan	1	1	1	1	4	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengendalian Inflasi	117.500.000,-	Setda	OPD Terkait
				Menfasilitasi Rapat terkait Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah	Rekomendasi	1.	1	1	1	.4	Koordinasi Lintas Sektor.	-	.Setda	OPD Terkait.
Terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi	Terciptanya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	84	Melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Laporan	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	21	21	21	21	84	terkait	26.899.736	Disdagkoprinum	Bid. Perdagangan
Stok ikan yang belum terdistribusi dengan baik	Terdistribusi-nya stok ikan di wilayah Kab. Luwu Timur	Tersedianya stok ikan di setiap kecamatan	11 Kecamatan	Produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap	2.563	2.566	2.567	2.571	10.267		Rp2.184.225.525	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	78.852	78.963	79.005	79.035	315.855		Rp4.210.000.000	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
				Produksi hasil pengolahan ikan	Ton	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan	79	82	90	94	345		Rp1.315.880.000	Dinas Perikanan	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

